

**Pengaruh Masyarakat  
Ekonomi ASEAN Terhadap  
Kondisi dan Mobilitas  
Tenaga Kerja ASEAN  
Tahun 2015**

Frequency of International Relations  
September, Vol 2(2) 31-61  
© The Author(s)  
fetrian.fisip.unand.ac.id  
Submission track :  
Submitted : Februari 12, 2021  
Accepted : Februari 17, 2021  
Available On-line : Februari 23, 2021

**Adelia Maretha Allayna**

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sriwijaya  
ayirin273@gmail.com

**M. Irfan Hidayatullah**

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sriwijaya

**Abstract**

Konsep kerja sama kawasan atau regionalisma mulai meluas di berbagai dunia. Salah satu kawasan yang berhasil membentuk regionalisme adalah Asia Tenggara yang bernama Association of Southeast Asians Nation (ASEAN) Salah satu tujuan dari ASEAN adalah pencapaian visi misi dari "ASEAN Vision 2020". Bentuk implementasi dari ASEAN Vision 2020 ini adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang memiliki lima pilar utama, salah satunya mengenai masalah ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aliran, kondisi, dan mobilitas tenaga kerja di wilayah Asia Tenggara dan bagaimana peluang dan tantangan ASEAN dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif yang berlandaskan pada konsep neoliberalisme. Rendahnya skill dari para pekerja membuat permasalahan ketenagakerjaan menjadi rumit karena tidak semua sumber daya manusia di setiap negara-negara ASEAN memiliki potensi dan fasilitas yang sama. Dengan terbentuknya Mutual Recognition Arrangements (MRA) dibawah kekuasaan ASEAN sebagai institusi regional diharapkan negara-negara ASEAN dapat mengatasi permasalahan tersebut demi terwujudnya visi misi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015.

**Keywords:** *Neoliberalisme; Regionalisme; Mobilitas Tenaga Kerja; ASEAN*

## Pendahuluan

Seringkali regionalisme dianalisis sebagai sebuah bentuk pengertian dari kekohevitatan sosial (etnisi, ras, agama, budaya, sejarah, dan kesadaran terhadap sebuah warisan bersama); kekohevitatan ekonomi (pola-pola perdagangan dan komplementaris ekonomi); kekohevitatan polirik (bentuk rezim atau ideology); dan kekohevitatan organisasi (keberadaan lembaga-lembaga regional) (Louis J. Cantori, 1970) . Secara lebih khusus meletakkan perhatian terhadap gagasan saling ketergantungan antar-kawasan (regional interdependence) (Nye, 1968) . Pengertian regionalisme dapat diklasifikasikan ke dalam 5 bentuk kategori yang berbeda yaitu regionalization, regional awareness and identity, regional interstate cooperation dan state-promoted regional integration; dan e) regional cohesion (Hurrell, 1995).

Regionalisme seringkali dipahami dalam konteks jaringan kerja atau pola-pola yang saling bergantung satu sama lain (interdependence). Bagi negara dan aktor non-negara pada suatu kawasan tertentu, regionalisme memiliki arti penting ketika membebaskan negara dari biaya-biaya yang membebani secara signifikan, dalam politik maupun ekonomi, dan ketika kawasan memiliki basis organisasi untuk tiap kebijakan pada kawasan yang melintasi sejumlah isu-isu penting (Prof. Drs. Budi Winarno, 2014).

Menyusul usainya Perang Dunia kedua, kita dipertontonkan dengan kemunculan fenomena politik baru dalam konstalasi politik global: kerja sama dan integrasi negara di suatu kawasan - dalam skala kontinental (Christiansen, 2001) . Stubbs dan Underhill (2000), mengidentifikasikan tiga faktor penting dalam regionalisme. Pertama, terdapatnya latarbelakang historis yang sama dan perasaan akan akan permasalahan-permasalahan bersama antar kelompok negara atau masyarakat yang berada dalam lintas batas geografis. Kedua, terdapatnya interaksi dan hubungan antar negara anggota yang cukup erat dibandingkan interkasi dengan negara lain yang berada di luar kawasan. Ketiga, hadirnya suatu bentuk organisasi kawasan yang menyebabkan terbentuknya kerangka institusi dan hukum dan menciptakan suatu “rules of the game” (Smith, 2001). Salah satunya adalah ASEAN. Di awal pembentukan ASEAN yang di prakasai oleh 5 negara, yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand yang pada saat itu berorientasikan pada bidang politik untuk menciptakan keamanan dan kedamaian pada kawasan Asia Tenggara. Sampai saat ini ASEAN memiliki 10 negara sebagai anggotanya dengan anggota yang pada tahap selanjutnya bergabung dengan ASEAN yaitu seperti Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. ASEAN mengalami perkembangan dimana yang awalnya hanya berioreinetasikan pada bidang politik, kini telah

mencakup bidang-bidang lain seperti sosial, budaya dan juga tentunya ekonomi. Berdirinya ASEAN tidak terlepas dari Interaksi dan hubungan yang erat antar anggotanya dibandingkan dengan kawasan yang lain. Adapaun pemicu dari terjalinnya kerja sama negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah rasa butuhnya setiap negara di Asia Tenggara terhadap kerja sama dalam suatu wadah regionalisme (Prof. Drs. Budi Winarno, 2014).

Seiring berjalannya waktu, bertempat di Kuala Lumpur pada 15 Desember 1997 “ASEAN Vision 2020” dicanangkan untuk dijadikan sebagai pedoman tujuan jangka panjang bagi ASEAN, yang berbunyi: “

".. as a concert of Southeast Asian nations, outward looking, living in peace, stability and prosperity, bonded together in partnership in dynamic development and in a community of caring societies." .

Selain itu disahkan pula visi ASEAN 2020, yaitu 1) mendirikan suatu kawasan yang stabil, makmurn dan memiliki daya saing tinggi yang diindikasikan melalui laju arus barang, jasa dan investasi yang bebas, ratanya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta berkurangnya tingkat kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan (Kementerian Perdagangan RI, 2018).

Pada pertemuan tingkat menteri yang berlangsung di Kuala Lumpur, telah disepakati rencana pengembangan ASEAN Economic

Community Blueprint yang merupakan pedoman bagi terbentuknya ASEAN Economic Community (atau dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN). (Bank Indonesia, 2008) . Blueprint ini sendiri merupakan panduan yang digunakan negara-negara anggota untuk dapat merealisasikan visi MEA 2015 yang pada tahap selanjutnya dilanjutkan dengan penciptaan Roadmap for ASEAN Community (2009-2015). Dalam perkembangannya, dirumuskan tujuan akhir dari integrasi ekonomi, yaitu mewujudkan ASEAN Vision 2020 pada Bali Concord II yang diadakan pada Oktober 2003. Pencapaian dari hal tersebut dilakukan lewat 5 pilar, yakni: arus bebas barang, jasa dan investasi, tenaga kerja yang berketerampilan, dan aliran modal yang mengalir lebih bebas. Dengan ditanda tangganinya "Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community 2015" yang dilakukan pada Januari 2007 di KTT ke-12., pencapaian ASEAN Community semakin nyata dan kuat. Dalam pertemuan tersebut negara-negara anggota ASEAN bersepakat untuk mempercepat pembentukan AEC dari yang sebelumnya 2020 menjadi 2015 (Bank Indonesia, 2008).

Regionalisme ASEAN memberikan dampak yang cukup kuat dalam melaksanakan hubungan kerja sama antara negara-negara ASEAN untuk merealisasikan visi misi yang sebelumnya telah disepakati bersama. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan

sebuah harapan bagi ASEAN agar dapat menjadi pasar tunggal dan basis produksi. Sebelum mencapai tujuan tersebut, hal penting yang patut diperhatikan adalah sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja. Namun, dikarenakan kondisi dan mobilitas tenaga kerja yang rendah, hal ini menghambat pencapaian visi dan misi ASEAN *Vision 2020*. Dibutuhkan tenaga kerja yang terampil dalam jumlah banyak untuk mewujudkan tujuan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, dirumuskan *Mutual Recognition Arrangements* (MRA) oleh ASEAN selaku institusi regional agar dapat menjembatani dan memperkuat kerja sama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara agar kondisi dan mobilitas tenaga kerja ASEAN dapat maksimal dikedepannya nanti. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aliran, kondisi, dan mobilitas tenaga kerja di wilayah Asia Tenggara dan bagaimana peluang dan tantangan ASEAN dalam menghadapi permasalahan tersebut.

### **Metode Penelitian**

Dalam menjelaskan mengenai Pengaruh Masyarakat Ekonomi ASEAN Terhadap Kondisi dan Mobilitas Tenaga Kerja ASEAN Tahun 2015, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Menurut Nazir, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa

sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki (Nazir, 1988) . Sedangkan menurut Sugiyono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2005) . Metode penelitian kualitatif sendiri merupakan metode penelitian dimana suatu penelitian menjelaskan berbagai hal terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut, baik itu berupa fenomena, isu, dll. Untuk data sendiri penulis menggunakan data sekunder dimana data yang diambil berupa Jural, Berita, Artikel, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam menarik kesimpulan dari hasil penelitian, penulis membuat suatu praduga sementara/hipotesa berdasarkan pemilihan teori yang penulis gunakan untuk menjelaskan secara teoritis terkait dengan fenomena yang penulis teliti (Somantri, 2005) . Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi.

## **Hasil**

### **1. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015**

ASEAN Economic Community (AEC) atau yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan suatu konsep yang berlaku setelah diadakannya ASEAN Concord II yang berlangsung di Indonesia atau tepatnya Bali pada Oktober 2003. MEA sendiri merupakan salah satu bentuk realisasi dari 5 pillar ASEAN Vision, bersamaan dengan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) dan ASEAN Security Community (ASC). MEA merupakan tujuan akhir dari terintegrasinya perekonomian kawasan Asia Tenggara seperti yang dicanangkan pada ASEAN Vision 2020 (Bank Indonesia, 2008):

... to create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN economic region in which there is a free flow of goods, services, investment, skilled labor and also freer flow of capital, equitable economic development and reduced poverty and socio-economis disparities in year 2020.

Realisasi MEA dilakukan dengan fokus pada empat kerangka strategis, yakni mencapai pasar tunggal dan keseragaman basis produksi, kawasan ekonomi yang memiliki daya saing, terintegrasinya perekonomian global, dan ratanya pertumbuhan ekonomi. Adapun melalui serangkaian elemen dan strategi yang tercakup di dalam MEA,

upaya untuk mencapai masing-masing kerangka tersebut pun dilakukan (Bank Indonesia, 2008, p. 10).

Demi tercapainya MEA secara maksimal, diperlukam liberalsiasi dan kerja sama, termasuk peningkatan integrasi dan kerja sama pada area-area baru yakni: pengembangan sumber daya manusia dan peningktan kapasitas (*capacity building*); kebijakan pembiayaan perdagangan; peningkatan infrastruktur dan sarana komunikasi; integrasi industri; peningkatan keterlibatan sector swasta; pengembangan transaksi elektronik lewat e-ASEAN; serta konsultasi yang lebih intense pada kebijakan makroekonomi dan keuangan (Bank Indonesia, 2008, p. 11).

Cebu Declaration yang sebelumnya telah disahkan pada ASEAN Summit ke-12 telah memutuskan untuk mempercepat realisasi dari MEA menjadi 2015 demi meningkatkan daya saing ASEAN dalam kompetisi global, terutama dari negara-negara seperti India dan China. Adapun terdapat beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi hal tersebut yakni: i) Sebagai dampak dari integrasi ekonomi, potensi terjadinya penurunan biaya produksi sebesar 10- 20 persen untuk barang konsumsi. (Company, 2003) ; (ii) Dengan pengimplementasian praktik standard dan internasional, Hak Kekayaan Intelektual, dan peningkatan persaingan, akan meningkatkan kemampuan kawasan.

Dengan terintegrasi nya transportasi, telekomunikasi dan energi maka akan kawasan akan lebih berkembang secara bersamaan. Integrasi pada bidang ekonomi pun kedepannya akan memberikan dampak positif teruntuk sector swasta yang memiliki peranan dan keterlibatan secara langsung. Dari 12 sektor yang diprioritaskan untuk terintegrasi, 9 diantaranya memberikan sumbangsih sebesar lebih dari 50% perdagangan barang di ASEAN dimana hal ini merupakan hal yang penting dan memiliki potensi untuk dimanfaatkan (Bank Indonesia, 2008, p. 12).

ASEAN melakukan transformasi “metode” kerja sama ekonomi melalui peletakan sebuah kerangka hukum yang dijadikan sebagai basis komitmen bagi negara anggota ASEAN lewat penandatanganan dan pengesahan piagam ASEAN (ASEAN Charter) pada 20 November 2007 di KTT ASEAN ke-13 guna untuk memperkuat dan memperteguh kembali langkah percepatan intergasi ekonomi di kawasan. Adapun blueprint (cetak biru) pada dasarnya merupakan arah ataupun pedoman MEA dan jadwal strategis terkait dengan waktu dan tahapan relaisasi masing-masing pilar disepakati bersamaan dengan penandatanganan Piagam ASEAN. Selanjutnya komitmen menjadi arah berkpencapaian realisasi MEA kedepannya nanti baik untuk ASEAN sebagai kawasan ataupun oleh individu negara anggota. Tiap-tiap negara berkewajiban untuk

mempertahankan komitmen tersebut sehingga kredibilitas ASEAN akan meningkat menjadi lebih baik di kedepannya nanti. Secara teknis, pengawasan terhadap target pencapaian realisasi MEA dilakukan lewat ASEAN Baseline Report. Hal tersebut tentunya menjadikan komitmen ASEAN dalam merealisasikan MEA bukan lagi karena atas dasar “persaudaraan” melainkan mempunyai kekuatan hukum tertentu (Bank Indonesia, 2008, pp. 12-13).

Para pemimpin ASEAN menandatangani ASEAN Charter bersamaan dengan cetak biru MEA 2015 yang merupakan gambaran besar atau grand design dari MEA yang berisikan jadwal strategis terkait dengan tahapan-tahapan relaisasi dari kelima pilar MEA. Adapun target waktu realisasi MEA terbagi menjadi 4 fase yaitu 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, dan 2014-2015. Cetak biru ini menjadi pedoman arah bagi kawasan ataupun negara anggota guna mencapai MEA 2015. Tiap-tiap negara wajib untuk mempertahankan dan menjalankan komitmen yang berada dalam cetak biru demi membentuk dan menjaga kredibilitas ASEAN (Bank Indonesia, 2008, p. 15). Cetak biru ini menjadi orientasi bagi kawasan maupun negara anggota untuk mencapai MEA 2015. Setiap negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam cetak biru untuk membangun kredibilitas ASEAN.

Mengingat pentingnya perdagangan eksternal bagi ASEAN dan strategi pembangunan ekonomi di negara ASEAN yang outward looking, cetak biru MEA memuat empat kerangka kerja atau pilar MEA, yaitu:

1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.

2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembanaan infrasturuktur, perpajakan dan e-commerce.

3) ASEAN sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara yang termuat dalam Initiative for ASEAN Integration.

4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan koheren dengan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global (Bank Indonesia, 2008).

Keempat pilar MEA saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional harus memiliki daya saing ekonomi yang tinggi, baik sebagai kawasan dalam kerangka persaingan dengan kawasan/negara lain, maupun antar individu anggota. Untuk itu, kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara anggota harus diperkecil sehingga playing field antarnegara anggota menjadi setara. Keterkaitan keempat pilar MEA tersebut membutuhkan koordinasi konsistensi dan kesatuan arah elemen-elemen dari setiap pilar, dimulai dari perencanaan sampai dengan tahap implementasi. Untuk menjamin hal tersebut maka keempat pilar perlu didukung oleh riset, capacity building dan efektivitas kelembagaan ASEAN, serta komitmen kuat setiap negara (Bank Indonesia, 2008).

## **2. Aliran Bebas Tenaga Kerja Terampil dalam MEA 2015**

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam mewujudkan visi misi ASEAN. Aliran tenaga kerja terampil menjadi salah satu topik yang menjadi fokus perhatian bersama (Bank Indonesia, 2008). Peraturan mengenai tenaga kerja terdapat didalam cirtak biru , namun pengaturan tersebut hanya dibatasi sampai peraturan khusus tenaga kerja terampil. Sementara itu, pengaturan mengenai tenaga kerja

terampil tidak dibahas dalam pengaturan tersebut. Pembahasan mengenai hal-hal terkait unskilled labour biasanya dibicarakan secara bilateral antarnegara karena dipandang sebagai isu yang sensitif (Bank Indonesia, 2008).

Di satu sisi, definisi mengenai tenaga terampil (skilled labour) tidak dijelaskan secara rinci dalam cetak biru. Namun, definisi tenaga terampil dapat diartikan sebagai tenaga kerja yang memiliki keterampilan (skill) dalam pengetahuan atau kemampuan diberbagai bidang tertentu. Tenaga kerja terampil juga dapat didefinisikan sebagai pekerja yang memiliki keahlian di suatu bidang tertentu atau khusus yang didapatkan melalui pengalaman pekerjaan yang dilakukan setiap hari.

Pengaturan mobilitas tenaga kerja terdapat dalam cetak biru MEA 2015. Disebutkan bahwa terdapat fasilitas masuk atau mobilitas bagi para pekerja untuk mendukung kelancaran pergerakan arus perdagangan baik dalam barang maupun jasa serta investasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Untuk memfasilitasi aliran jasa-jasa yang bebas pada 2015, ASEAN memberikan perhatian khusus dengan melakukan upaya untuk menciptakan harmonisasi dan standarisasi melalui berbagai langkah:

1) meningkatkan kerjasama di berbagai bidang sesama anggota ASEAN University Network (AUN) dalam rangka meningkatkan dan memperlancar mobilitas para pelajar dan staffnya di kawasan;

2) meningkatkan kompetensi utama dan standar maupun skill pekerja yang dibutuhkan dalam berbagai sektor jasa prioritas maupun sektor jasa lainnya.

3) meningkatkan kemampuan dalam melakukan riset atau penelitian agar dapat meningkatkan memperkuat kemampuan riset dalam rangka meningkatkan keterampilan, penempatan kerja, dan pengembangan jejaring informasi pasar tenaga kerja di antara negara anggota ASEAN (Bank Indonesia, 2008).

Dibidang ketenagakerjaan, tonggak penting (milestone) tersebut adalah berupa terbentuknya Mutual Recognition Arrangements (MRA) serta kompetensi utama untuk pekerjaan yang memerlukan keahlian atau keterampilan di sektor jasa (Bank Indonesia, 2008).

Mutual Recognition Arrangements (MRA) adalah salah satu faktor pendorong dalam sektor jasa. MRA dapat diartikan sebagai kesepakatan yang dilakukan bersama oleh seluruh negara anggota ASEAN untuk saling mengakui dan menerima berbagai aspek hasil penelitian dalam bentuk tes atau sertifikat (Bank Indonesia, 2008) . MRA juga dapat dijadikan sebagai sebuah instrumen kebijakan dalam

rangka memajukan integrasi ekonomi dan meningkatkan perdagangan antar negara. Menurut Tullao dan Cortez (2006), tujuan pembentukan MRA dimaksudkan untuk menciptakan prosedur dan mekanisme akreditasi mencapai kesamaan atau kesetaraan serta mengakui perbesaan antarnegara dalam hal pendidikan dan pelatihan, pengalaman, serta persyaratan lisensi untuk praktik profesi.

### **3. Kondisi dan Mobilitas Tenaga Kerja di ASEAN**

Dari jumlah penduduk ASEAN yang pada 2006 mencapai 567,6 juta orang, hampir 283 juta merupakan penduduk usia kerja atau rapat digolongkan sebagai angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja tersebut meningkat 14,5 persen bila dibandingkan dengan keadaan pada 2000 atau meningkat rata-rata 2,2 persen per tahun. Pada Periode yang sama, negara mengalami pertumbuhan angkatan kerja terbesar dialami oleh Kamboja (52,8 persen). Sementara angkatan kerja di beberapa negara ASEAN lain, tumbuh pada kisaran 11-24 persen, kecuali di Singapura dan Thailand meningkat kurang dari 9 persen (Bank Indonesia, 2008) . Sementara itu, dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja, proporsi tingkat partisipasi angkatan kerja wanita secara umum menempati porsi lebih dari 50 persen dari tingkat partisipasi angkatan kerja pria. Dari gambar tersebut, dapat

dilihat gap antara angkatan kerja pria dan wanita di setiap negara (Bank Indonesia, 2008).

Sementara itu, pertumbuhan mobilitas tenaga kerja intra-kawasan yang cepat, menunjukkan peningkatan integrasi pasar tenaga kerja di antara negara-negara ASEAN. Pada 2005, total pekerja migran yang berasal dari negara-negara lain di kawasan ASEAN mencapai sekitar 13,5 juta orang. Dari jumlah ini, 39 persen bekerja di antara negara ASEAN lainnya, 26 persen bekerja di luar ASEAN terutama di Timur Tengah (ILO, 2007). Di samping mencari alternatif peluang kerja, pada umumnya para pekerja cenderung berpindah ke negara lain apabila pendapatan yang akan diterima di negara tujuan relatif lebih besar dari negara asal. Perpindahan pekerja dari suatu negara dengan tingkat upah yang rendah ke yang relatif tinggi, atau negara yang jumlah tenaganya lebih banyak dapat memberikan manfaat secara individu negara maupun bagi perekonomian secara global. Hal ini juga mendorong mobilitas tenaga kerja antarnegara di kawasan ASEAN. Bagi perekonomian global, perpindahan tenaga kerja intra-kawasan diharapkan akan meningkatkan efisiensi sumber daya, produktivitas pekerja, pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja di ASEAN secara keseluruhan (ILO, 2007).

Meningkatnya perpindahan para tenaga kerja yang melampaui batas negara menimbulkan tantangan tersendiri bagi setiap pemerintah negara. Hal ini terutama mengingat masih banyaknya para pekerja yang berkecimpung di sektor informal, mengakibatkan kesulitan dalam pengelolaan dan upaya perlindungan bagi para pekerja migran (Bank Indonesia, 2008). Kesadaran setiap negara atas pentingnya perlindungan hak-hak para pekerja migran, tercermin dari penandatanganan *The ASEAN Declaration on the Protection and the Promoting of Rights of Migrant Workers* pada Januari 2007 yang berisi beberapa kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pekerja dan komitmen ASEAN dalam memajukan dan mengembangkan kualitas dan perlindungan para pekerja migran (Bank Indonesia, 2008).

Secara umum, negara-negara ASEAN dapat diklasifikasikan atas tiga kelompok yakni negara pengirim tenaga kerja, negara penerima tenaga kerja, serta negara pengirim sekaligus penerima tenaga kerja (Tereseo, 2006). Singapura merupakan negara tujuan yang paling disukai di kawasan ASEAN. Pada tahun 2000, terdapat sekitar 607.000 pekerja migran berasal dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan China (Abella, 2004 dalam Tullao et.al., 2006). Demikian pula dengan Brunei yang menjadi negara net importir pekerja terampil sejak 1980-an, mengingat Brunei merupakan negara dengan jumlah penduduk relatif kecil sementara perekonomiannya

berkembang cukup pesat (De Guzman, 2003). Negara yang merupakan pengirim tenaga kerja pada umumnya mempunyai jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi namun tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Oleh karena itulah, negara tersebut cenderung lebih protektif terhadap penerimaan tenaga kerja profesional asing (Bank Indonesia, 2008).

#### **4. Peluang dan Tantangan Bagi ASEAN**

MEA Sendiri sangat jelas tentunya memiliki potensi yang dapat memberikan efek positif pada tingkat penyerapan tenaga kerja yang signifikan di kawasan ASEAN. Hal ini berarti akan mengurangi tingkat pengangguran di kawasan ASEAN yang tentunya akan memberikan dampak yang positif pada perekonomian negara anggota ASEAN. Tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di kawasan ASEAN secara perlahan akan berkurang karena tersedianya lowongan pekerjaan di negara lain, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja itu sendiri. Di sisi lain, mobilitas yang tinggi dapat meningkatkan keterampilan dan menambah wawasan serta pengalaman kerja. Hal inilah yang akan mendorong proses keseimbangan di pasar tenaga kerja ASEAN. Untuk memaksimalkan keuntungan yang didapatkan, negara-negara anggota ASEAN harus menerapkan dan meningkatkan kebijakan

regional terkait migrasi tenaga kerja, mengembangkan pendekatan regional terhadap tenaga kerja migran low-and medium-skilled yang akan menjadi fondasi pertumbuhan permanen di wilayah tersebut (Rother).

Meskipun terlihat begitu menguntungkan, nyatanya masih banyak pr yang harus dikerjakan negara-negara anggota ASEAN agar MEA 2015 dapat berjalan efektif, yaitu masih terbilang rendahnya tingkah pendidikan dan keterampilan para pekerja. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pekerja yang memenuhi *Mutual Recognition Agreements* (MRAs) atau kualifikasi kelayakan tenaga kerja yang ada hanya sekitar 1,5% dari angkatan kerja di kawasan ini, Sedangkan 87% tenaga kerja lainnya tidak memiliki keterampilan dan banyak diantaranya tidak memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan. Lebih lanjut, meskipun The ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (MNP) dan ASEAN Chartered Professional Engineers Coordinating Committee (ACIA) memfasilitasi mobilitas lintas batas, standar visa yang berlaku masih belum seragam di seluruh wilayah dan tentunya menghambat kemampuan pemberi kerja untuk merekrut tenaga kerja dari negara anggota ASEAN lainnya. Selanjutnya masih banyaknya kebijakan ketenagakerjaan yang dibatasi oleh sejumlah negara Asia Tenggara pun menjadi tantangan bagi MEA 2015. Hal ini sendiri menunjukkan kurangnya kemauan

politik dan publik untuk mengejar peningkatan mobilitas tenaga kerja. Politisi, asosiasi professional, dan publik merasa takut akan pekerja migran yang berkerumun di negara-negara kaya akan menimbulkan persaingan dan ketidakstabilan yang meningkat, sementara negara-negara yang lebih miskin takut kehilangan sebagian besar tenaga kerja mereka yang potensial (*brain drain*). Lama waktu pengimplementasian juga menjadi tantangan tersendiri bagi MEA 2015. Transisi perubahan dari ASEAN menjadi MEA 2015 secara penuh. Hal ini dapat terjadi sebab adanya perbedaan penetapan waktu untuk menyesuaikan dengan proses realisasi MEA secara penuh. Hal ini tentu saja akan menghambat MEA 2015 yang tentunya berimplikasi pada kondisi dan mobilitas tenaga kerja (Adhist, 2017). Terakhir tantangan yang dihadapi bagi MEA sendiri adalah meningkatnya tindak kriminalitas *human trafficking*. Seperti yang sebelumnya telah penulis jelaskan terkait dengan kualitas tenaga kerja ASEAN, pada kenyataannya 87% tenaga kerja tidak memenuhi kualifikasi MRA. Hal ini tentu saja akan berimplikasi kepada meningkatnya aksi tindak kriminalitas *human trafficking* sebab tenaga kerja yang tidak memenuhi kualifikasi tersebut cenderung akan terjerumus dalam lingkaran *human trafficking* (ILO, 2016). Selain tantangan-tantangan diatas masih banyak lagi pr yang harus diselesaikan oleh negara-negara anggota ASEAN seperti perlindungan

terhadap para pekerja migran, penyediaan sarana dan infrastruktur yang memadai untuk menjamin kelancaran mobilitas tenaga kerja, dan lain-lain (Koty, 2016).

### **Diskusi dan Analisis**

Dalam mendefinisikan ataupun menafsirkan fenomena maupun isu yang terjadi dalam dunia hubungan internasional kita tidak terlepas dari yang namanya teori. Terdapat banyak teori-teori yang dapat digunakan dalam mendefinisikan fenomena dalam dunia hubungan internasional, seperti teori liberalisme, realisme, marxisme, dan lain-lain. Adapun teori yang akan digunakan pada tulisan ini ialah teori neoliberalisme. Neoliberalisme merupakan teori yang bisa dibilang sering di dengar oleh para akademisi terutama bagi akademisi yang bergelut dalam bidang ilmu sosial dan politik. Neoliberalisme sendiri merupakan teori turunan dari salah satu aliran pemikiran utama di dalam hubungan internasional yaitu liberalisme.

Liberalisme mengharuskan negara untuk membebaskan mekanisme pasar bekerja lewat deregulasi dengan mengurangi hambatan dan tahapan produksi, mempermudah birokratisasi perdagangan, ataupun mengurangi bahkan menghilangkan tariff dalam perdagangan demi mewujudkan free trade. Ekonomi model liberalisme inilah yang menjadi fundamental bagi ekonomi sejumlah

negara pada tahun 1800-an sampai awal 1900-an. Akan tetapi, dimulai dari tahun 1930-an konsep tersebut pun runtuh ketika terjadinya bencana depresi (The Great Depression) yang melanda dunia. Layaknya teori-teori ekonomi lainnya, munculnya neoliberalisme dipicu karena krisis ekonomi dimana kemunculan neoliberalisme sendiri merupakan modifikasi dari sistem ekonomi liberalisme dan kapitalisme itu sendiri. Neoliberalisme pun pada akhirnya berhasil menyelesaikan permasalahan ekonomi di sejumlah negara. Hal ini dibuktikan dengan perekonomian Inggris yang mengalami perbaikan pada tahun 1978. Hal yang senada juga terjadi di Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Ronald Reagan selama dua periode (1981-1989). Kedua negara tersebut berhasil menurunkan inflasi dan pengangguran dengan cara menerapkan kebijakan neoliberalisme yaitu privatisasi, deregulasi, pengurangan pajak dan subsidi, dan lain-lain (Caniago, 2010).

Sebagai sebuah teori setidaknya terdapat dua poin utama yang menjadi prinsip dari teori neoliberalisme itu sendiri; pertama, neoliberalisme memiliki pandangan bahwasanya sistem internasional bersifat anarki, yaitu suatu kondisi dimana tidak adanya bentuk pemerintahan mutlak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan negara itu sendiri. Sistem yang anarki tersebut mendorong negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu, bukan

karena *human nature* yang mendorong negara melakukan suatu tindakan layaknya yang dikemukakan oleh teori liberalism. Kedua, neoliberalisme pada dasarnya beranggapan bahwasanya kerja sama internasional akan sulit untuk dijalankan secara penuh dibawah sistem internasional yang anarki, namun neoliberalisme tetap memandangnya dengan optimisi dimana peranan institusi internasional dapat mengatasi permasalahan tersebut sehingga dapat menjalankan dan mengatur hal-hal yang terkait dengan kerja sama internasional (Dunne, Kurki, & Smith, 2013). Neoliberalisme layaknya yang dikemukakan dalam liberalsime institusional menyetujui bahwa institusi internasional bukan sekedar sebagai aktor figuran yang tidak memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Intternasional, melainkan merupakan aktor yang berperan aktif dan memberikan dampak yang signifikan sebagai media yang mempermudah dan memungkinkan terjalinnya kerjasama antara negara-negara dalam sistem yang anarki (Dugis, 2018, pp. 91-93).

Melalui kedua poin utama dari prinsip neoliberalisme penulis menghasilkan asumsi dasar terkait dengan persepektif neoliberalisme, antara lain; 1) Neoliberalisme merupakan teori yang state centric, Negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional yang selalu mengedepankan kepentingan nasionalnya. Selain mempercayai negara sebagai actor utama, Neoliberalisme juga percaya ada aktor

lain yang berperan penting dan turut berkontribusi dalam mendukung dinamika hubungan internasional, seperti NGO, IGO, MNC bahkan Individu. 2) Dalam kerja sama yang kompetitif negara berusaha untuk mendapatkan *profit* yang maksimal. Kerja sama antara negara-negara dapat terjalin karena adanya saling ketergantungan atau interdependensi yang menyebabkan timbulnya proses timbal balik atau saling memenuhi kepentingan masing-masing negara tanpa merugikan semua pihak. 3) Dalam hubungan internasional permasalahan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan, namun permasalahan tersebut pada akhirnya akan dan dapat diatasi oleh institusi internasional yang sebelumnya telah mengatur jalannya kerjasama antar negara. Bagi neoliberalisme institusi internasional memiliki posisi yang penting, sebab ketika terjadinya distribusi kekuasaan posisi institusi internasional akan tetap bertahan. 4) Institusi internasional akan diberi legitimasi oleh negara untuk mengatur jalannya kerja sama internasional apabila dianggap memberikan keuntungan dan menjamin tercapainya kepentingan nasional nya (Dugis, 2018, pp. 87-88).

Dari prinsip sampai kepada asumsi dasar dapat kita lihat bahwasanya peranan institusi internasional bagi neoliberalisme cukup penting di mana institusi internasional memegang peranan mengatur dan mengkoordinir jalannya kerja sama antar negara baik dalam

skala regional bahkan global. Dalam perpolitikan internasional, neoliberalisme memiliki pandangan terhadap struktur internasional yang bersifat anarki dan kompetitif. Oleh sebab itulah, neoliberalisme mengedepankan kerja sama sebagai pemecah permasalahan terkait tindakan preventif dari terjadinya konflik internasional yang dibantu oleh kehadiran institusi internasional ataupun rezim internasional. Dengan begitu, setiap negara akan saling berlomba untuk memaksimalkan kerja sama dengan negara lain untuk mencapai keuntungan. Apabila terindikasi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh negara lain terkait dengan kepentingan nasional yang menghambat jalannya kerja sama, maka disinilah institusi internasional menjalankan tugasnya untuk mencegah terjadinya konflik yang berpotensi akan terjadi dikedepannya (Alifa, 2020).

Oleh karena itulah berdasarkan uraian diatas penulis menggunakan analisis peranan institusi atau rezim internasional dan kerja sama antar negara anggota nya dalam menganalisis dampak regionalisme kawasan Asia Tenggara dan kerja sama antara anggotanya dalam kondisi dan mobiltas tenaga kerja. Dalam mewadahi dan mengatur jalannya kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara terdapat sebuah institusi regional yang menaungi negara-negara anggotanya yaitu ASEAN. Apabila dilihat dari kacamata neoliberalisme, ASEAN merupakan institusi regional di

kawasan Asia Tenggara yang mempermudah terjalannya kerja sama antar negara di mana tentunya ASEAN memiliki peranan dalam terjadinya mobilitas tenaga kerja di kawasannya.

### **Kesimpulan**

MEA adalah dampak dari regionalisme ASEAN yang direncanakan untuk direalisasikan pada tahun 2015 sesuai dengan ASEAN *Vision* 2020. Salah satu faktor yang menghambat proses pencapaian MEA 2015 adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan para pekerja itu sendiri. Aliran bebas tenaga kerja terampil tentu saja berdampak pada kondisi dan mobilitas masyarakat ASEAN yang mana belum memenuhi standar pekerja yang ada. Oleh karena itula, dibentuknya MRA di berbagai bidang profesi dalam cetak biru MEA 2015 diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan yang ada. Meskipun mobilitas tenaga kerja profesional di kawasan ASEAN meningkat, masih ada beberapa kendala yang patut diperhatikan dan dicari solusinya agar mendukung dan menjamin terjadinya aliran bebas tenaga kerja terampil dan dapat menjadi faktor pendorong bagi peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja di kawasan ASEAN.

Penggunaan teori neoliberalisme sendiri memberi penjelasan pada hasil penelitian. Di mana menurut asumsi dari neoliberalisme itu

sendiri mengatakan bahwasanya ASEAN merupakan regionalisme yang secara tidak langsung telah mempengaruhi atau memberikan dampak terhadap kondisi dan mobilitas tenaga kerja di wilayahnya. Hal ini dapat dilihat di mana diralisasikan nya MEA 2015 bersamaan dengan instrumen-instrumen pendukung lainnya. Yang menjadi permasalahan dalam kondisi dan mobiltas tenaga kerja adalah pada komitmen dari tiap-tiap anggota dari ASEAN itu sendiri. Peranan ASEAN di sini diperlukan untuk menjembatani dan memperkuat kerja sama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara agar kondisi dan mobilitas tenaga kerja ASEAN dapat maksimal di kedepannya nanti.

## Daftar Pustaka

- Adhist, M. (2017). Free Movement of Skilled Labor Within the Asean Economic Community. *Jurusan Ekonomi Pembangunan*, 203.
- Alifa, N. N. (2020, June). *Peran ASEAN dan Urgensi Kerjasama Internasional dalam Menangani Pandemi Covid-19 menurut Teori Neoliberalisme*. Retrieved February 2, 2021, from [https://www.researchgate.net/publication/342391932\\_THI\\_Nabila\\_Nur\\_Alfia\\_071911233064\\_Peran\\_ASEAN\\_dan\\_Urgensi\\_Kerjasama\\_Internasional\\_dalam\\_Menangani\\_Pandemi\\_Covid-19\\_menurut\\_Teori\\_Neoliberalisme](https://www.researchgate.net/publication/342391932_THI_Nabila_Nur_Alfia_071911233064_Peran_ASEAN_dan_Urgensi_Kerjasama_Internasional_dalam_Menangani_Pandemi_Covid-19_menurut_Teori_Neoliberalisme): [https://www.researchgate.net/publication/342391932\\_THI\\_Nabila\\_Nur\\_Alfia\\_071911233064\\_Peran\\_ASEAN\\_dan\\_Urgensi\\_Kerjasama\\_Internasional\\_dalam\\_Menangani\\_Pandemi\\_Covid-19\\_menurut\\_Teori\\_Neoliberalisme](https://www.researchgate.net/publication/342391932_THI_Nabila_Nur_Alfia_071911233064_Peran_ASEAN_dan_Urgensi_Kerjasama_Internasional_dalam_Menangani_Pandemi_Covid-19_menurut_Teori_Neoliberalisme)
- Bank Indonesia. (2008). Aliran Bebas Tenaga Kerja. In R. W. Rohmadyati, *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015* (p. 243). Jakarta: PT Gramedia.
- Bank Indonesia. (2008). Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. In R. A. Budiman, *Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015* (p. 9). Jakarta: PT Gramedia .
- Caniago, S. A. (2010). *MUNCULNYA NEOLIBERALISME SEBAGAI BENTUK BARU LIBERALISME*. Retrieved 2 9, 2021, from [media.neliti.com](http://media.neliti.com): <https://www.neliti.com/publications/37038/munculnya-neoliberalisme-sebagai-bentuk-baru-liberalisme>
- Christiansen, T. (2001). *European Integration and Regional Cooperation dalam John Baylis & Steve Smith. The Globalozation of World Politic: An Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.
- Company, M. &. (2003). *ASEAN Competitiveness Study*. ASEAN Secretariat.
- Dugis, V. (2018). *Teori Hubungan Internasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. (2013). *International Relation Theories : Discipline adn Diversity 3rd edition*. New york: Oxford Universty Press.
- Hurell, L. F. (1995). *Regionalism in World Politics: Regional Organization and International Order*. New York: Oxford University Press.
- ILO. (2016). *Managing labour mobility: Opportunities and challanges fpr emmployers in the ASEAN region*. Thailand: ILO.

- Kementerian Perdagangan RI. (2018, April 18). *Masyarakat Ekonomi Asean*. Retrieved from Direktorat Jendral Perundingan Perdagangan Internasional: <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean/meaaec>
- Koty, A. C. (2016, May 13). *Labor Mobility in ASEAN: Current Commitments and Future Limitations*. Retrieved February 9, 2021, from ASEAN Briefing: <https://www.aseanbriefing.com/news/asean-labor-mobility/>
- Louis J. Cantori, S. L. (1970). *The Internaational Politics of Regions: A Comparative Approach*. Englewood Cliffs: BJ: Pretice Hall.
- Nye, J. S. (1968). *International Regionalism: Readings*. Boston: Little, Brown & Co.
- Prof. Drs. Budi Winarno, M. P. (2014). *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Rother, S. (n.d.). *Labour Mobility and the ASEAN Economic Community*. Retrieved February 9, 2021, from OAV: <https://www.oav.de/iap-32014/artikel-616.html>
- Smith, M. (2001). *Regional and Regionalism dalam Brian White. Issues in World Politics*. New York: Palgrave.
- Somantri, G. R. (2005). MEMAHAMI METODE KUALITATIF. *MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL. 9, NO. 2, 57-58*.

## **Deklarasi Kepentingan yang Bertentangan**

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan kepengarangan dan / atau publikasi artikel ini.

## **Biografi**

**Adelia Maretha Allayna**, merupakan salah satu mahasiswa semester 6 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dengan Konsentrasi Strategi dan Keamanan Internasional dan memiliki ketertarikan terhadap perkembangan kawasan regional Asia Tenggara dan isu-isu keamanan kontemporer, seperti penambahan populasi dunia.

**M. Irfan Hidayatullah**, merupakan salah satu mahasiswa semester 6 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dengan Konsentrasi Diplomasi Perdagangan Internasional dan memiliki ketertarikan terhadap rantai nilai global, tatanan perpolitikan dan ekonomi di kawasan regional Eropa dan ASEAN, serta isu-isu terkait dengan ekspor dan impor.